

**EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KLABANG
KECAMATAN KLABANG KABUPATEN BONDOWOSO**

Senain¹ Farida Hanum²

¹Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

²Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

Email : senain@unaras.ac.id

ABSTRAK

Permasyarakatan Desa (BPD) yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa, maka para Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) harus memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan maksimal. Kehadiran BPD telah memberikan harapan dengan keberlangsungan demokrasi desa. BPD berperan bukan sebagai tangan panjang dari pemerintah, tetapi lebih merupakan tangan panjang dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis efektifitas fungsi pengawasan badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan Pembangunan infrastruktur Di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena alamiah dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) kuantitas kerja semua anggota hanya beberapa anggota saja yang memiliki moral kerja yang baik untuk menjalankan tugasnya, 2) kualitas kerja kurang optimalnya sehingga ada program yang tidak terselesaikan dengan baik, 3) pemanfaatan waktu dalam pembangunan lancar tidak menemui kendala namun kurang memanfaatkan waktu dalam dilaksanakannya musrenbang, 4) Sumber daya manusia dalam keanggotaan BPD kurang memenuhi standar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kata kunci: Efektivitas, Badan Permasyarakatan Desa, Pembangunan Infrastruktur

ABSTRACT

Village Consultative Assembly (BPD) plays a very important role in determining the success of Village Government implementation of village development and village community development, the Members of the Village Consultative Body (BPD) must have an appropriate and better level of knowledge and insight so that the success rate of development can be achieved maximally. The presence of BPD has given hope to the sustainability of village democracy. BPD acts not as a long arm from the government, but rather a long hand from the community as well as an intermediary between the

community and the village government. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the supervisory function of the Village Consultative Body in implementing infrastructure development in Klabang Village, Klabang District, Situbondo Regency.

This study uses a qualitative method, by making observations about a natural phenomenon by collecting data using observation, interview, and documentation methods. The location of the research was conducted in Klabang Village, Klabang District, Bondowoso Regency.

Based on the results of the study: 1) the quantity of work of all members is only a few members who have good work morale to carry out their duties, 2) the quality of work is less than optimal so there are programs that are not completed properly, 3) the use of time in development smoothly does not encounter obstacles but does not utilize time in the implementation of musrenbang, 4) human resources in BPD membership do not meet the standards in carrying out their duties and functions.

Keywords: Effectiveness, Village Consultative Body, Infrastructure Development

PENDAHULUAN

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara.

Pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata disemua lapisan masyarakat, dimana setiap masyarakat berhak memperoleh kesempatan berperan serta dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara, serta menuju pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55, BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki

kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa harus transparan mulai dari perumusan sampai pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk diketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan. BPD-lah yang mempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkatan pemerintahan desa.

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam UU No.22 tahun 1999 kemudian revisinya UU No.32 tahun 2004 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah mitra kerja." Masing-masing elemen memiliki fungsi yang lebih spesifik dan dari sanalah kekuatan itu berasal. Kekuasaan didistribusikan atau dipisahkan untuk memudahkan pengelolaan pembangunan. Interaksi antar elemen juga didasarkan atas *check and balances system* sehingga kontrol atas jalannya pembanguna dapat dilakukan secara kolektif. Artinya Kepala Desa harus bekerja sama dengan BPD dalam menyelenggarakan pembangunan Desa. BPD melakukan pengawasan kepada kepala desa agar berjalan sesuai dengan peraturan. Jika terdapat kekeliruan BPD meluruskan Kepala Desa dan BPD sama-sama membuat peraturan desa. BPD tidak boleh menjatuhkan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas. Pemerintah Desa dan BPD di Desa Klabang dapat berperan dan berfungsi untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Klabang harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan , sehingga Pemerintah Desa dan BPD akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Maka peneliti menarik untuk meneliti dengan judul "Efektivitas fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa klabang kecamatan klabang kabupaten bondowoso". Adapaun Rumusan penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa klabang kecamatan klabang kabupaten bondowoso ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa klabang kecamatan klabang kabupaten bondowoso.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas.

Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang didapat atau dialaminya selama bekerja.

Kualitas Kerja

Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh anggota berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan didalam mengerjakan pekerjaan.

Pemanfaatan Waktu

Setiap karyawan harus dapat menggunakan waktu seefisien mungkin, terutama dengan cara datang tepat waktu ke kantor dan berusaha untuk menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dengan memanfaatkan waktu selama penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Diperlukan guna mewujudkan hasil yang diharapkan oleh lembaga. Setiap anggota sudah sepatutnya diarahkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja mereka melalui berbagai tahapan usaha secara maksimal. Sehingga dengan demikian pemanfaatan sumber daya manusia akan lebih berpotensi dan lebih mendukung keberhasilan pencapaian tujuan lembaga.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, Maka penelitian ini menggunakan metode

Menurut Nazir (2005:54) Penelitian deskriptif adalah:

“Suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”

Tipe penelitian , peneliti menggunakan studi penelitian kebijakan dengan tipe penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:9) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, karena peneliti ingin menguraikan atau menggambarkan dan mengungkapkan suatu realita yang ada dilapangan baik berupa kalimat maupun gambar, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Sehingga dengan menggunakan metode dengan tipe tersebut dapat dideskripsikan secara rinci dan lebih jelas.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh dan mempermudah dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ditentukan sesuai dengan yang diteliti.

Dalam hal ini peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Desa Klabang Kecamatan Klabang. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Desa Klabang merupakan

salah satu penerima program kawasan prioritas di Provinsi Jawa Timur.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan juli sampai dengan September 2023.

Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah segala sesuatu berupa sumber-sumber penyedia informasi yang bisa diolah menjadi data guna mendukung sebuah penelitian. Data-data yang dikumpulkan bisa berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Meskipun terdapat data berupa angka, hanya digunakan sebatas penjelas dan penegas saja. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong (2012:157), sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi, foto dan lain-lain.

Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang-orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan).

Menurut Moleong (2012:132), "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan komunikasi latar penelitian".

Informan dalam penelitian ini, untuk memperkaya atau memperbanya kejelasan dan akurasi informasi serta mampu memberikan informasi yang rinci dan mendalam. Informan terdiri dari masyarakat penerima program kawasan prioritas yaitu 4 orang, sedangkan Key Informan terdiri dari orang-orang yang mengetahui dan memahami proses perencanaan hingga pelaksanaan program kawasan prioritas yaitu 2 orang. Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah 6 orang.

Tabel 3.1 Karakteristik Informan

NO	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN	USIA	JABATAN
1	H. Etto Suenarto	SMA	65	Kepala Desa
2	Jakfar Prasetyo	SMA	52	Ketua BPD
3	Udik Mediansyah	SMA	32	Kepala Urusan Pembangunan
4	Suryandi	SMA	48	Masyarakat
5	Trisni Hermawati	SMA	38	Masyarakat
6	Hermanto	SMA	39	Masyarakat
7	Martoyo	SMA	42	Masyarakat

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa menegetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Arikunto (2010:134), Metode pengambilan atau pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Bila dilihat dari segi cara, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengambilan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data mengenai kenyataan hendak dipelajari dengan menggunakan cara pengamatan. Menurut Sugiyono (2015:64), menjelaskan observasi partisipatif ialah:

“Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.”

Observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode observasi partisipasi (*passive participation*), jadi dalam hal ini peneliti mengamati serta mencatat gejala-gejala yang diselidiki, namun tidak terlibat secara langsung dalam situasi yang di observasi, Karena penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan program kawasan prioritas yang telah selesai pembangunannya.

2. Wawancara

Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada orang-orang dalam lingkungan atau yang terlibat dalam program kawasan prioritas. Menurut Moleong (2008:186) “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu”. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan atau tanya jawab secara langsung kepada pihak yang dianggap berkompeten serta mampu memberikan keterangan tentang segala informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tipe recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Teknik pengambilan data dengan cara mencatat dan memanfaatkan data-data tertulis yang ada di instansi atau organisasi yang berkaitan dengan penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data menjadi suatu yang penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam penelitian dengan data dan analisis kualitatif. Hal ini dikarenakan adanya keraguan dan kemungkinan terjadinya distorsi atas sebuah informasi data maupun hasil analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik keabsahan data triangulasi.

Menurut Sugiyono (2015:273), menyatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, , triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau dengan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber dan/atau metode. Penggunaan salah satu atau dua macam triangulasi ini dalam pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas ketersediaan informasi yang dapat diperoleh peneliti melalui triangulasi tersebut. Dengan cara membandingkan sumber dan/atau metode, maka data yang diperoleh diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian.

Menurut Patton dalam (Moelong, 2012:330), triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

1. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen berkaitan.

2. Triangulasi dengan metode terdapat dua strategis atau cara yaitu pengecekan derajat kepercayaan penentuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap terakhir dari penelitian ini. proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, terutama bila diinginkan generalisasi atau untuk memperoleh kesimpulan yang tegas dan jelas dari hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso.

Melihat keterlaksanaan program BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat dan menetapkan kebijakan desa dalam pembangunan infrastruktur upaya untuk menilai seberapa jauh sebuah program BPD dapat efektif, sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Maka berdasarkan dari pengertian efektivitas yaitu salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Efektivitas pada dasarnya menekankan pada hasil yang dicapai untuk menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Jadi semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Dengan adanya efektivitas kita dapat mengetahui seberapa jauh program BPD terhadap pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik atau tidak di Desa Klabang.

Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang didapat atau dialaminya selama proses pelaksanaan program BPD. Berikut hasil wawancara dari *key informan* dan *informan*. Dari hasil wawancara mengenai BPD dapat mengatasi segala kendala yang ada serta anggota BPD mempunyai moral yang baik dengan Bapak Haji Etto Suenarto selaku Kepala Desa Klabang, beliau mengatakan:

“Ada tapi sudah teratasi dengan baik oleh BPD dan semua perangkat desa juga membantu agar kendala yang di alami oleh BPD teratasi dengan baik. Setiap anggota sudah mempunyai moral yang baik untuk menjalankan setiap tugas dan fungsinya.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 11.00 WIB).

Hal ini dipertegas dengan pernyataan Bapak Udik selaku Kepala Urusan Pembangunan Klabang:

“Menurut saya sudah tidak ada. Karena bisa diatasi dengan baik. Iya sudah, setiap anggota mempunyai moral yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas BPD” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, jam 11.30 WIB)

Bapak Jakfar Prasetyo menyatakan pendapatnya selaku Ketua BPD desa Klabang:

“Kalau masalah pasti ada dalam pelaksanaan setiap program tapi dapat diatasi dengan baik oleh BPD dan semua perangkat desa juga membantu agar kendala yang di alami oleh BPD teratasi dengan baik. Setiap anggota sudah mempunyai moral yang baik untuk menjalankan setiap tugas dan fungsinya.”(Wawancara hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, jam 16.00WIB)

Dari pernyataan *Key Informan* di atas telah tergambar bahwa kinerja dari pemerintah desa serta lembaga BPD telah berusaha agar setiap kinerjanya berjalan dengan baik dan lancar. Namun pendapat masyarakat berbanding terbalik dengan yang disampaikan pemerintah desa serta anggota BPD yang kurang setuju dengan kinerja dari BPD yang ada di Desa Klabang. Berikut pernyataan dari Bapak Suryandi selaku masyarakat desa Klabang:

“Kalau kendala pasti ada, tapi seperti yang saya lihat kendala itu bisa di atasi oleh desa. Kendala-kendala itu bisa dari masyarakat yang terkadang tidak menyetujui tentang program pembangunan yang akan diadakan oleh BPD. Belum, karena dalam rapat yang beberapa anggotanya tidak menghadiri rapat musrembang yang diadakan oleh desa.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 14.00 WIB)

Sedangkan pernyataan dari Bapak Martoyo selaku masyarakat desa Klabang, beliau berpendapat:

“Menurut pendapat saya setiap perencanaan pasti ada kendala yang dihadapi entah itu dari dana maupun dalam perencanaan program pembangunan. Belum, karena setiap anggota membutuhkan peningkatan moral untuk menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.” (Wawancara hari Rabu tanggal 6 September 2023, Jam 17.00 WIB)

Dan juga Bapak Hermanto selaku masyarakat Klabang, beliau berpendapat:

“Awalnya memang memuaskan tapi tidak lama kemudian banyak dari hasil perencanaan BPD tidak sesuai dengan fungsinya.” (Wawancara hari Kamis, 7 September 2023, Jam 16.00 WIB)

Ibu Trisni Hermawati juga berpendapat sebagai berikut:

“Dalam penyelesaian kendala, BPD dapat mengatasi di dalam menetapkan peraturan namun dalam keikutsertaan dari setiap rapat anggota BPD kurang maksimal.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 13.00 WIB)

Bapak Etto Suenarto selaku Kepala Desa Klabang, beliau mengatakan bahwa:

“Sudah efektif karena BPD sudah melakukan tugasnya yaitu menetapkan peraturan yang ada di Desa Klabang dan menampung semua aspirasi dari masyarakat.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 11.00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja dari anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya menetapkan peraturan dan menampung aspirasi masyarakat serta dalam perencanaan program telah berjalan dengan efektif, namun kendala dari sebagian masalah ataupun kurang efektifnya kinerja BPD disebabkan karena sebagian anggota BPD yang kurang aktif dalam kerjanya sehingga hasil dari kinerja BPD tidak efektif sepenuhnya.

Kualitas Kerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, setiap anggota BPD menunjukkan hasil dari kerjanya sebagai penampung aspirasi masyarakat dan kemudian di jadikan usulan untuk pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Dengan demikian tingkat keberhasilan dari program pembangunan infrastruktur di Desa Klabang akan tinggi dan akurat. Berikut hasil wawancara mengenai keberhasilan program BPD dengan Bapak H.Etto Soenarto selaku Kepala Desa Klabang:

“Semua program sudah terlaksana dengan baik. Untuk melakukan program berhubungan dengan BPD. Pelaksanaan pembangunan dari perwakilan kepermusyawaratan yang menjadi program desa tidak lepas dari BPD, Karena sudah sepakat/bersenergi sebelum melaksanakan pembangunan itu bermusyawarah dengan BPD. Tanpa BPD, desa tidak dapat menjalankan program yang ada di desa Klabang ini.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 11.00 WIB)

Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Bapak Udik Mediansyah selaku kepala urusan pembangunan Desa Klabang:

“Sejauh ini sudah baik dan bisa dinikmati oleh masyarakat seperti pembangunan yang baru saja selesai yaitu terasering untuk menahan area persawahan supaya tidak ambles ke sungai. Sebelumnya itu sudah melalui proses musyawarah di musrembang yang diikuti sertakan anggota BPD.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, jam 11.30 WIB)

Bapak Jakfar Prasetyo menyatakan pendapatnya selaku Ketua BPD desa Klabang:

“Ya memang semua program yang dijalankan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mempermudah aktivitas masyarakat dalam melakukan pekerjaan setiap hari.” (Wawancara hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, jam 16.00WIB)

Sedangkan pernyataan dari Bapak Hermanto selaku masyarakat desa Klabang selaku pengguna infrastruktur yang ada:

“Menurut saya sudah, tapi hasil dari pelaksanaan tidak berlangsung lama, banyak pembangunan yang tidak sampai satu tahun sudah rusak. Semisal plengsengan di jalan penghubung antara desa Klabang dan Klampokan yang tidak sampai 1 tahun sudah ambles karena pekerjaannya kurang kuat di pondasi bangunan.” (Wawancara hari Kamis, 7 September 2023, Jam 16.00 WIB)

Berikut hasil wawancara dari Kepala Desa Klabang, bapak Etto Suenarto berpendapat bahwa:

“Iya sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam rapat musrebang sudah disepakati oleh tokoh masyarakat .” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 11.00 WIB)

Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Bapak Udik Mediansyah selaku kepala urusan pembangunan Desa Klabang:

“Menurut saya sudah sesuai dan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Setiap pembangunan sudah berdasarkan kepentingan yang paling diutamakan di masyarakat.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, jam 11.30 WIB)

Hal demikian juga diutarakan dari pendapat Ibu Trisni Hermawati selaku masyarakat desa Klabang:

“Sejauh ini sudah sesuai semua seperti pembangunan infrastruktur menurut saya sudah tepat sasaran.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 13.00 WIB)

Bapak Suryandi selaku masyarakat Desa Klabang berpendapat sebagai berikut:

“Iya sesuai. Kalo masalah itu sudah tidak ada permasalahan lagi. Cuma masalahnya ada di kualitasnya saja supaya lebih di utamakan.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 14.00 WIB)

Bapak Hermanto selaku masyarakat Desa Klabang mengutarakan pendapatnya, beliau berpendapat bahwa:

“Sudah sesuai dan cocok untuk masyarakat dan supaya ditambah lagi pembangunan infrastruktur yang ada.” (Wawancara hari Kamis, 7 September 2023, Jam 16.00 WIB)

Demikian juga diutarakan oleh Bapak Martoyo selaku masyarakat Desa Klabang, beliau berpendapat bahwa:

“Memurut saya kalau masalah sesuai di masyarakat ya sudah sangat berguna. Kedepannya supaya lebih membangun prasarana yang yebih digunakan oleh masyarakat seperti jalan dan prasarana lainnya.” (Wawancara hari Rabu tanggal 6 September 2023, Jam 17.00 WIB)

Dari semua pernyataan responden diatas sudah jelas bahwa program dari hasil bersinergi dengan kepala desa serta setelah diadakannya rapat musrenbang bahwa apa

yang direncanakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat desa Klabang.

Pemanfaatan Waktu

Setiap pekerjaan atau program pembangunan infrastruktur BPD dan pemerintah Desa Klabang harus dapat menggunakan waktu seefisien mungkin, terutama dengan cara berusaha untuk menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dengan memanfaatkan waktu selama penggunaan pelaksanaan program. Berikut wawancara mengenai waktu pelaksanaan program dengan Kepala Desa Etto Suenarto mengatakan bahwa:

“Sudah baik. Semua berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan. Semua program pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan program-program pembangunan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala atau masalah yang terjadi.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 11.00 WIB)

Bapak Udik selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Klabang berpendapat bahwa:

“Semua program berjalan dengan lancar sesuai waktu yang ditentukan di dalam rapat musrenbang.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 11.30 WIB)

Bapak Jakfar Prasetyo menyatakan pendapatnya selaku Ketua BPD desa Klabang:

“Iya sudah. Kalau masalah waktu menurut saya sudah tidak ada kendala lagi.” (Wawancara hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, jam 16.00WIB)

Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat Bapak Suryandi di desa Klabang. Berikut yang diutarakan beliau:

“Menurut saya program-program BPD sudah berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Semua pekerjaan dari program selesai dan tidak ada kendala. Mungkin di kualitas dari pembangunannya saja yang bermasalah.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 14.00 WIB)

Dalam menilai masalah pemanfaatan waktu dari jalannya program di desa Klabang sudah tidak ada masalah. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari Bapak Martoyo, beliau mengatakan:

“Program pembangunan sudah terlaksana dengan baik dan tidak memakan waktu yang cukup lama sehingga masyarakat bisa langsung menikmati hasil dari program pembangunan yang sudah selesai.” (Wawancara hari Rabu tanggal 6 September 2023, Jam 17.00 WIB)

Hal demikian juga diutarakan dari pendapat Ibu Trisni Hermawati selaku masyarakat desa Klabang:

“Menurut saya program BPD berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sehingga saya bisa langsung menikmati hasil dari program BPD tersebut.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 13.00 WIB)

Bapak Hermanto selaku masyarakat Desa Klabang berpendapat bahwa:

“Menurut saya dari segi pemanfaatan waktu sudah tidak ada masalah dari program BPD semua sudah selesai dalam waktu yang diperkirakan.” (Wawancara hari Kamis, 7 September 2023, Jam 16.00 WIB)

Bapak Hermanto mengutarakan pendapatnya sebagai berikut, beliau berpendapat bahwa:

“Sudah terlaksana dengan baik karena saya sering mengikuti musrenbang yang diadakan oleh BPD untuk membahas program pembangunan. Dan waktu yang diberikan digunakan dengan baik.” (Wawancara hari Kamis, 7 September 2023, Jam 16.00 WIB)

Bapak Martoyo selaku masyarakat Desa Klabang berpendapat bahwa:

“Menurut pendapat saya tugas BPD merencanakan program pembangunan tidak terlaksana dengan baik karena masih banyak program yang terbengkalai dan pemanfaatan waktu yang diberikan untuk merencanakan program tidak digunakan dengan baik masih banyak anggota BPD yang hanya ikut saja tetapi tidak ikut dalam perencanaan program tersebut.” (Wawancara hari Rabu tanggal 6 September 2023, Jam 17.00 WIB)

Dari pernyataan beberapa masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa dari sekian kesempatan dalam diadakannya musrenbang, anggota BPD belum memanfaatkan waktu dengan maksimal dari pelaksanaan musrenbang yang diadakan di kantor Desa Klabang. Adapun anggota yang memanfaatkan waktu tersebut hanyalah sebagian anggota saja yang berperan aktif mengutarakan pendapatnya saat rapat kemudian sebagian lagi hanya ikut serta saja dalam kegiatan rapat musrenbang.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan setiap program pembangunan di desa Klabang diperlukan kualitas sumber daya manusia yang memadai dari aparat desa Klabang serta anggota dari BPD untuk menjalankan seluruh kegiatan di desa Klabang agar lebih memahami tentang tugas pokok dan fungsinya agar jalannya pembangunan di Desa Klabang berjalan dengan baik dan maksimal. Dalam hal ini Bapak Etto Soenarto memberikan pendapat tentang kualitas SDM dari anggota BPD desa Klabang:

“Sudah melaksanakan dengan baik dan sudah mempunyai SDM yang standar, pemilihan anggota BPD sudah didasarkan oleh pendidikan atau mempunyai pengetahuan lebih tentang pembangunan serta dianggap bisa mengutarakan pendapat dari dilakukannya musyawarah.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 11.00 WIB)

Pernyataan diatas juga dipertegas dengan pernyataan Bapak Udik Mediansyah yang selaku kepala urusan pemerintahan:

“Sudah memenuhi standar karena anggota BPD sudah menjalankan tugasnya dengan baik walaupun jenjang pendidikannya sebagian ada yang tidak tinggi. Menurut saya sudah bisa menjadi anggota BPD dan layak karena mereka disegani masyarakat dan ketua dari BPD tersebut merupakan tokoh masyarakat desa Klabang.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, jam 11.30 WIB)

Bapak Jakfar Prasetyo menyatakan pendapatnya selaku Ketua BPD desa Klabang:

“Sudah. Semua anggota dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan tentang menjalankan fungsi dari BPD dan dipilih karena adalah tokoh kepercayaan masyarakat.” (Wawancara hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, jam 16.00 WIB)

Bapak Etto Suenarto selaku Kepala Desa Klabang, beliau berpendapat bahwa:

“Menurut saya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota BPD sudah efektif jadi tidak perlu ada peningkatan SDM.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 11.00 WIB)

Pernyataan diatas juga dipertegas dengan pernyataan Bapak Udik Mediansyah yang selaku kepala urusan pemerintahan:

“Kualitas SDM yang dimiliki oleh BPD menurut saya sudah efektif jadi tidak perlu ada perubahan anggota BPD.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, jam 11.30 WIB)

Bapak Suryandi berpendapat bahwa:

“Menurut pendapat saya upaya yang harus dilakukan jika anggota BPD tidak memiliki kualitas SDM yang kurang efektif anggotanya itu harus diganti atau kalau tidak adakan pelatihan agar anggota BPD memiliki kualitas SDM yang baik. (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 14.00 WIB)

Ibu Trisni Hermawati selaku masyarakat desa Klabang, beliau menyatakan:

“Upaya yang harus dilakukan oleh BPD itu harus merombak semua struktur yang ada dan mengganti dengan SDM yang baru yang lebih berkualitas.” (Wawancara hari Senin tanggal 20 Agustus 2023, Jam 13.00 WIB)

Bapak Hermanto selaku masyarakat Desa Klabang berpendapat bahwa:

“Upaya yang dilakukan untuk mengatasi SDM yang kurang memenuhi standar yaitu harus mengganti ketua BPD ataupun anggotanya agar BPD kedepannya lebih baik lagi. (Wawancara hari Kamis, 7 September 2023, Jam 16.00 WIB)

Bapak Martoyo selaku masyarakat Klabang juga mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya yang harus dilakukan yaitu yang pertama kepala desa mengadakan pemilihan ketua BPD yang baru, kedua harus merombak lagi struktur anggota dan diganti dengan yang baru, ketiga BPD harus lebih selektif memilih anggota agar yang dimiliki lebih berkualitas. (Wawancara hari Rabu tanggal 6 September 2023, Jam 17.00 WIB)

Berbeda dari pernyataan *key informan* yang menjelaskan bahwa BPD sudah mempunyai SDM memadai, masyarakat berpendapat bahwa sebaiknya harus merombak struktur BPD dan mengganti anggota dari BPD karena SDM yang dimiliki belum berkualitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil evaluasi penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso belum mempunyai kualitas kerja yang tinggi, sebab kinerjanya masih belum dikatakan maksimal karena masyarakat belum merasa puas dengan kinerja BPD dalam menetapkan peraturan dan menampung aspirasi dari masyarakat.

Berdasarkan indikator evaluasi program kawasan prioritas, yaitu terdiri dari 4 indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Indikator yang pertama adalah kuantitas kerja, dari semua anggota hanya beberapa anggota saja yang memiliki moral kerja yang baik untuk menjalankan tugasnya.
2. Indikator yang kedua adalah kualitas kerja, hasil program pembangunan BPD tidak memuaskan karena kurangnya kinerja yang tinggi dan semua program tidak berlangsung lama.

3. Indikator yang ketiga adalah pemanfaatan waktu, pembangunan lancar tidak menemui kendala namun kurang memanfaatkan waktu dalam dilaksanakannya musrenbang.
4. Indikator yang keempat adalah sebagian anggota BPD kurang mempunyai SDM yang sesuai standar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga harus mengadakan pemilihan anggota baru.

Efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Klabang, dari indikator evaluasi yang tidak berjalan sesuai perencanaannya atau harapan dan kenyataannya serta fungsi berbeda seperti yang terdapat dalam indikator efektivitas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan oleh peneliti dari penelitian tentang efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, sebagai berikut:

1. Kedepannya BPD supaya lebih melibatkan masyarakat luas dalam musyawarah di balai desa supaya masyarakat bisa menyampaikan pendapat program apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak hanya orang itu saja yang selalu ikut rapat musyawarah.
2. Jangan dari pihak-pihak tertentu saja yang diundang dalam rapat musyawarah rencana pembangunan. Libatkanlah masyarakat luas untuk memusyawarahkan program desa yang akan dilaksanakan dan fungsikan BPD itu siapa ketuanya, sekretarisnya, bendaharannya. Jadi di desa tidak cuma hanya dijadikan simbol dan peran serta dari BPD perlu digalakkan jangan cuma pihak-pihak tertentu yang harus mengikuti musyawarah agar masyarakat juga tau apa program desa.
3. Kedepannya dalam menunjuk anggota BPD diharapkan untuk mencari masyarakat yang berkualitas dan mampu untuk mengatasi masalah - masalah yang ada dalam pembangunan dan lebih mengerti tentang fungsi dari BPD agar kedepannya tidak membuang anggaran yang sudah diberikan ke desa untuk membangun jalan, MCK, dan plengsengan terutama yang sangat dibutuhkan masyarakat.
4. Jika ada program lagi di desa sebaiknya bersosialisasi di masyarakat karena masyarakat banyak berpengaruh dan pendapat masyarakat sangat berperan dan yang menikmati pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, Ribdyah Hanafi. 2002. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmosoeparto, Kisdarto. 2002. *Menuju SDM Berdaya - Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Bungkaes. 2013. *Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Surakarta. PT. Jaya Abadi.
- Meoleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Pelayanan Publik*. Yogyakarta: BPTE.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi penelitian kualitatif Edisi Refisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Pamungkas. 2005:38. *Kinerja Organisasi*. Bandung: PT. Refika Aditama *PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016*
- Prawirosentono. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Edisi 1 Cetakan Kedelapan. BPFE.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Tangkilisan, Hall. 2005. *Pengantar Ilmu Organisasi Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 *tentang Desa*.
- Undang-Undang No.22 Tahun 1999 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *tentang Otonomi Daerah*.
- Undang-Undang No.10 Tahun 2004 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2005 *tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek*.
- Peraturan Pemerintah No.84 Tahun 2000 *tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*.
- Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus media.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.